

Evaluasi Kebijakan Program Tugas Belajar ke Luar Negeri pada Masa Kedaruratan

Tri Mulatasih¹, Ratri Istania², Mala Sondang Silitonga
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
tri.mulatasih@gmail.com¹

Abstract

This study aims to explore the factors influencing the implementation of the overseas study assignment program for civil servants (ASN) during the emergency period caused by the COVID-19 pandemic. A qualitative research method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal several factors, both directly and indirectly, affecting the policy implementation of the overseas study program during the emergency period. First, international travel restrictions resulted in the postponement of departures for scholarship recipients. Second, sudden changes in administrative procedures and a lack of inter-agency coordination caused confusion and delays in the administrative processes. Third, uneven digitalization of administrative systems created technological adaptation gaps among ASN, especially those participating in the study assignment program. Fourth, budget efficiency efforts were not accompanied by proper evaluation of learning outcomes or holistic capacity development of the civil servants. Fifth, limited access to online learning tools and internet connectivity worsened the conditions of distance learning, with inadequate institutional support from the sending agencies. The recommendations from this study may serve as a basis for formulating public policy in the area of civil servant human resource development. It emphasizes the need for more adaptive, sustainable, and responsive policy strategies in emergency situations to ensure the strategic goals of the overseas study assignment program remain achievable during crises.

Keywords: policy evaluation; study assignment; civil servants; COVID-19 pandemic; public policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri selama masa kedaruratan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi implementasi kebijakan program tugas belajar ke luar negeri pada masa kedaruratan. Pertama, kebijakan pembatasan perjalanan internasional menyebabkan tertundanya keberangkatan bagi penerima tugas belajar ke luar negeri. Kedua, perubahan prosedur administratif yang mendadak dan kurangnya koordinasi lintas lembaga mengakibatkan kebingungan dan keterlambatan proses administrasi tersebut. Ketiga, digitalisasi administrasi yang belum merata menimbulkan kesenjangan adaptasi teknologi di antara ASN khususnya bagi penerima tugas belajar ke luar negeri. Keempat, efisiensi anggaran tidak diikuti oleh evaluasi terhadap efektivitas capaian pembelajaran maupun kontribusi terhadap pengembangan kapasitas ASN secara holistik. Kelima, keterbatasan perangkat daring dan akses internet memperburuk kondisi pembelajaran jarak jauh tanpa dukungan yang memadai dari institusi pengirim. Rekomendasi hasil penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perumusan kebijakan publik dalam sektor pengembangan SDM aparatur dalam kerangka membangun tata kelola kebijakan yaitu perlunya strategi kebijakan yang lebih adaptif, berorientasi pada keberlanjutan, serta responsif terhadap situasi darurat agar tujuan strategis program tugas belajar tetap tercapai dalam kondisi kedaruratan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; tugas belajar; ASN; pandemi Covid-19; kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Kebijakan tugas belajar ke luar negeri merupakan bagian dari strategi pembangunan SDM unggul yang telah lama diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Melalui program ini, aparatur sipil negara, dosen, dan mahasiswa mendapatkan akses pembelajaran dan kolaborasi riset internasional. Namun, masa kedaruratan nasional seperti pandemi COVID-19 mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu bertahan dan beradaptasi terhadap kondisi darurat.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung selama krisis, serta untuk merumuskan strategi kebijakan ke depan agar program ini tetap dapat dilaksanakan secara efektif dalam kondisi luar biasa.

Melihat data statistik yang ada pada data sistem perjalanan dinas luar negeri yang mengelola data tugas belajar luar negeri dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data penerbitan dokumen surat persetujuan tugas belajar *Tahun 2019-Juni 2023*

Jenis Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDLN Doktoral	819	417	1099	1055	442
PDLN Master	628	436	607	851	374
PDLN Postdoktoral	31	7	49	52	22
PDLN Sarjana	173	36	11	87	23
Total	1651	896	1766	2045	861

Sumber: Data SIMPEL, diolah

Dari tabel tersebut adalah data surat persetujuan program tugas belajar yaitu program Doktoral, program Master, program Postdoktoral dan program sarjana, yang diterbitkan persetujuannya oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pada kondisi normal yaitu sebelum pandemi pada tahun 2019 jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 1651 surat. Berbeda dengan saat pandemi Covid-19 melanda dunia, jumlah dokumen persetujuan program tugas belajar mengalami penurunan hingga 896 dokumen. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2020 semua negara menerapkan kebijakan yang sama yaitu penutupan akses untuk orang asing masuk ke suatu wilayah negara. Demikian juga pemerintah Indonesia. Kebijakan dibidang pendidikan juga mengalami perubahan dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sistem pembelajarannya.

Berikut adalah data jumlah permohonan penugasan ke luar negeri secara umum yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pejabat lainnya, pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, atau tenaga indonesia dan pegawai pemerintahan yang mewakili negara yang diberikan oleh lembaga negara atau instansi pemerintah, dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar negeri. Dari sebelum masa pandemi yaitu tahun 2019 sampai dengan Juni 2023.

Tabel 2 Data Penerbitan Dokumen Surat Persetujuan PDLN Tahun 2019 – Juni 2023

Kategori	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah dokumen	28.850	4.348	3.349	10.600	9.069
Jumlah orang	69.116	8.932	9.147	30.116	26.815

Sumber: Data SIMPEL, diolah

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan tren perjalanan dinas luar ke negeri yang disetujui oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara mengalami penurunan yang signifikan sejak awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Hal ini karena pada pertengahan Maret 2020 Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan kebijakan penangguhan perjalanan dinas luar negeri yaitu dengan diterbitkannya surat edara penangguhan setiap agenda perjalanan dinas ke luar negeri yang direncanakan oleh pegawai atau pejabat kementerian lembaga. Terkecuali permohonan persetujuan untuk hal-hal tertentu dan permohonan penugasan pegawai ASN yang akan melaksanakan tugas belajar ke luar negeri.

Namun demikian masih ada beberapa negara pada pertengahan tahun 2020 hingga yang masih belum terdampak pandemi dan membuka akses bagi orang asing untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Walaupun jadwal pelaksanaan mulai pembelajaran sempat tertunda yang seharusnya sudah dimulai awal tahun 2020 namun karena pandemi sehingga ditunda sampai dengan mendekati akhir tahun 2020. Negara-negara yang masih membuka aksesnya untuk penerima studi baik program doktoral maupun master.



Gambar 1.2. Data jumlah penerima tugas belajar di 10 negara terbesar yang membuka sistem pembelajaran untuk program Doktoral tahun 2020

(Sumber: Data SIMPEL, diolah)

Grafik pada Gambar 1.2. diatas adalah menjelaskan jumlah penerima tugas belajar di 10 (sepuluh) negara dengan negara penerima terbesar sampai urutan terkecil untuk program studi Doktoral (S3) pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020. Pada saat pandemi sistem pembelajaran dibuka melalui teknik pembelajaran daring/online/offline maupun hybrid. Urutan negara yang paling banyak diminati oleh para penerima tugas belajar program studi Doktoral adalah Australia, Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Taiwan, Malaysia, Jerman, Korea Selatan dan yang terakhir adalah Perancis.



Gambar 1.3. Data jumlah penerima tugas belajar di 10 negara terbesar yang membuka sistem pembelajaran untuk program Master tahun 2020
(Sumber: Data SIMPEL, diolah)

Sedangkan pada Gambar 1.3. diatas adalah menjelaskan jumlah penerima tugas belajar di 10 (sepuluh) negara dengan negara penerima terbesar sampai urutan terkecil untuk program studi Master (S2) pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020. Sama seperti pola pembelajaran program Doktoral, untuk sistem pembelajaran program studi Master dilaksanakan dengan teknik pembelajaran daring/online/offline maupun hybrid. Urutan negara yang paling banyak diminati oleh para penerima tugas belajar program Master adalah Jepang, Australia, Inggris, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Skotlandia, dan urutan terakhir adalah Taiwan.

Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan keselamatan dan menjamin kelancaran dan keamanan studi di luar negeri selama pandemi tersebut. Beberapa masalah yang diidentifikasi terkait dengan kebijakan tersebut antara lain:

1. Tertundanya program tugas belajar bagi ASN yang berdampak pada pencapaian akademik dan penundaan studi.
2. Ketidakpastian jadwal tugas belajar serta pembatasan mobilitas ke luar negeri.
3. Perubahan bentuk pembelajaran dari yang semula tatap muka menjadi daring yang mungkin tidak memberikan kualitas dan pengalaman yang setara jika pembelajaran dilakukan langsung secara offline.
4. Potensi terganggunya pengembangan karier dan peningkatan kompetensi ASN yang ditunda karena kebijakan tersebut.
5. Kecenderungan menurunnya motivasi dan minat belajar para penerima tugas belajar di luar negeri pada saat pandemi Covid-19.

6. Perubahan kebijakan penyelenggaraan program tugas belajar akibat pandemi.
7. Kurangnya sosialisasi kebijakan mengenai pelaksanaan program tugas belajar pada situasi pandemi.
8. Belum adanya desain kebijakan program tugas belajar dalam kondisi kedaruratan nasional.

Adapun Rumusan Permasalahan

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri selama masa kedaruratan nasional?
2. Bagaimana strategi kebijakan yang dapat dikembangkan untuk pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri dalam menghadapi situasi kedaruratan nasional di masa mendatang?

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri selama masa kedaruratan nasional.
2. Merumuskan strategi kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri secara adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi situasi kedaruratan nasional di masa mendatang.

KAJIAN LITERATUR

Teori Kebijakan Publik

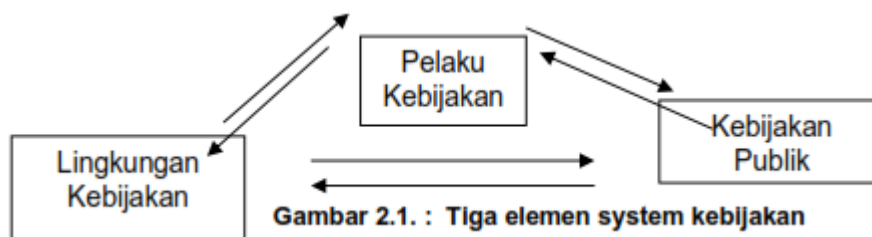
Dalam kehidupan yang serba modern seperti sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan didalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan Kesehatan sampai dengan pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan (Dunn, 1999). Berbeda dengan Dunn, kebijakan publik menurut Anderson (2003) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. (Aktor) dan faktor non pemerintah juga dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan publik).

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh dabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2017). Terdapat beberapa implikasi dari konsep kebijakan publik ini sebagai tindakan yang relatif stabil dan purposif yang diikuti oleh pemerintah dalam menangani beberapa masalah atau masalah yang menjadi perhatian. (Anderson, 2003).

1. definisi tersebut menghubungkan kebijakan dengan tindakan purposif atau berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau kejadian kebetulan. Adanya kelonggaran dari tujuan suatu kebijakan dan keruh dalam konten, sehingga memberikan arahan umum daripada target yang tepat untuk implementasinya.
2. kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan yang berdiri sendiri.
3. kebijakan publik muncul sebagai tanggapan terhadap tuntutan kebijakan, atau klaim untuk tindakan atau bertindak pada beberapa masalah publik yang

dibuat oleh aktor lain. Menanggapi tuntutan kebijakan, pejabat publik membuat keputusan yang memberikan konten dan arahan terhadap kebijakan publik.

4. kebijakan melibatkan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan hanya apa yang ingin mereka lakukan atau apa yang dikatakan pejabat akan mereka lakukan. Yang relevan disini adalah konsep output kebijakan, atau tindakan yang benar-benar diambil dalam mengejar keputusan dan pernyataan kebijakan.
5. kebijakan publik dapat berupa positif atau negatif. Dunn (1999), mengemukakan bahwa proses kebijakan terdiri atas "penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan". Kebijakan melibatkan 3 (tiga) elemen utama yang saling terkait satu sama lainnya seperti gambar di bawah :



Gambar 2.1. : Tiga elemen system kebijakan

Teori evaluasi Kebijakan

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan erumusan Kembali masalah (Dunn, 1999).

Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi kebijakan (Handoyo, 2012). Sedangkan pemantauan (monitoring) menyediakan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya (Dunn, 1999).

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk pengendalian. Hal ini fokus kepada pemahaman bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas dari begitu saja. Kebijakan harus diawasi. Evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut (Nugroho, 2017).

Menurut Dunn dalam bukunya Nugroho (2017) evaluasi kinerja kebijakan menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan "apa perbedaan yang dibuat?" Evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn dibagi menjadi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Kriteria evaluasi diterapkan secara restrospektif (ex post), sementara kriteria rekomendasi diterapkan secara prospektif (ex ante). Tipe-tipe evaluasi kinerja kebijakan yang dikemukakan para ahli diantaranya :

Tipe evaluasi yang dikembangkan menurut Dunn (1999) Menurut Dunn dalam Nugroho (2017) menjabarkan kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tipe Kriteria:

1. Efektivitas: Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi : Berapa banyak dipergunakan sumberdaya?
3. Kecukupan : seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?

4. Pemerataan atau equity: Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
5. Responsivitas : Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan : Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut juga evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pegaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif. Secara spesifik Dunn dalam bukunya Nugroho (2017) mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis.

Kerangka berpikir menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program tugas belajar ke luar negeri pada masa kedaruratan. Permasalahan tersebut kemudian akan dibahas menggunakan teori Evaluasi kebijakan menurut willian Dunn. Efektifitas, Efisiensi, responsivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dengan dukungan analisis tren data. Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan, adalah, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Sedangkan menurut Arikunto (2002) menyampaikan bahwa metode penelitian adalah "cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian." Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan untuk menciptakan (Sugiyono, 2017).

Sedangkan menurut Creswell (2014), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dari sudut pandang partisipan dalam situasi tertentu. Data sekunder diperoleh dari Sistem Informasi Perjalanan Luar Negeri (SIMPEL) Kementerian yang berwenang, meliputi jumlah dokumen surat persetujuan tugas belajar berdasarkan jenjang pendidikan serta jumlah individu dan dokumen pada periode 2019 hingga Juni 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Jumlah Penerbitan Dokumen Tugas Belajar ke Luar Negeri

Tabel 1 di bawah menunjukkan fluktuasi jumlah persetujuan Tugas belajar ke luar negeri dari tahun 2019 hingga 2023

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Dokumen Persetujuan PDLN berdasarkan Jenjang Pendidikan (2019–2023)

Jenis Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
PDLN Doktoral	819	417	1099	1055	442
PDLN Master	628	436	607	851	374
PDLN Postdoktoral	31	7	49	52	22
PDLN Sarjana	173	36	11	87	23
Total	1651	896	1766	2045	861

Terjadi penurunan tajam pada tahun 2020, di mana total hanya 896 persetujuan diterbitkan, atau berkurang 45,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada program postdoktoral dan sarjana. Meski terjadi pemulihan pada tahun 2021 dan 2022, jumlahnya belum stabil, dan kembali menurun pada 2023.

Jumlah Dokumen dan Individu yang Melakukan Perjalanan Luar Negeri

Tabel 2. Jumlah Dokumen dan Orang dalam Persetujuan PDLN (2019–2023)

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Dokumen	28.850	4.348	3.349	10.600	9.069
Jumlah Orang	69.116	8.932	9.147	30.116	26.815

Tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah dokumen hingga 84,9% dan jumlah individu hingga 87,1% dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini menggambarkan dampak langsung pandemi terhadap mobilitas internasional dalam konteks pengembangan SDM.

Implikasi Terhadap Kebijakan

Data tersebut mencerminkan bahwa kebijakan tugas belajar belum sepenuhnya adaptif terhadap situasi darurat. Hambatan teknis, administratif, dan diplomatik masih signifikan. Strategi ke depan perlu mencakup digitalisasi proses, pembentukan skema tugas belajar daring atau hybrid, serta kerangka kerja kebijakan darurat yang fleksibel namun akuntabel.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait evaluasi kebijakan program tugas belajar ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek implementasi, kendala administratif, pelaksana, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya. Walaupun terdapat berbagai upaya penyesuaian, pandemi tetap menyebabkan hambatan pada proses administrasi dan pelaksanaan program, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas serta pencapaian tujuan utama program tugas belajar ke luar negeri.
2. Dari sisi dampak terhadap ASN yang mengalami penundaan dalam program tugas belajar, ditemukan adanya pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan karier, prestasi akademik, serta kondisi psikologis, baik dalam jangka menengah maupun panjang. Kendala yang muncul selama pandemi menyebabkan keterlambatan dalam meraih target akademik dan karier, serta menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada tekanan psikologis ASN.

3. Sebagai respons terhadap tantangan ini dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi serupa di masa mendatang, penelitian ini merekomendasikan pentingnya strategi adaptasi dan keberlanjutan organisasi, seperti peningkatan fleksibilitas kebijakan, penguatan sistem administrasi berbasis daring, serta penambahan dukungan akademik bagi peserta. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program tugas belajar tetap optimal meskipun dihadapkan pada kondisi darurat. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan pada kebijakan agar program tetap berjalan dan tujuan pendidikan bagi ASN dapat tercapai, terutama di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk kepentingan akademisi dan praktisi.

1. Segi Akademisi

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang disebabkan oleh jumlah sampel yang relatif terbatas, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas lingkup studi dengan melibatkan responden atau institusi yang lebih banyak. Langkah ini bertujuan agar pemahaman mengenai implementasi serta dampak kebijakan program tugas belajar ke luar negeri, khususnya pada masa pandemi atau situasi darurat sejenis, dapat diperoleh secara lebih menyeluruh. Dengan memperbesar cakupan data, temuan penelitian diharapkan mampu mencerminkan keragaman pengalaman yang ada dan memperkuat landasan rekomendasi kebijakan yang diberikan.

2. Praktisi

Praktisi di masa mendatang juga disarankan untuk menerapkan berbagai metode penelitian guna menangkap dinamika yang mungkin belum terungkap dalam penelitian ini. Upaya-upaya tersebut penting dilakukan agar evaluasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pembuat kebijakan maupun pihak-pihak terkait lainnya.

PENGAKUAN

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian ini. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara yang sudah memberikan data terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Berka & Sarah Linney. (2020). Effective Global Mobility and International Recruitment During A Pandemic. *Lecture Notes in Educational Technology* .
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction*.
- Andiarna, F., & Kusumawati, E. (2020). *Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Stres Akademik Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19*.
<https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.9221>
- Andriani, W., Subandowo, M., Karyono, H., Gunawan, W., Pendidikan, T., Pascasarjana, S., ... Surabaya, A. B. (n.d.). *Learning Loss dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Corona*. Retrieved from <http://snastep.com/proceeding/index.php/snastep/index>

- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Reneka Cipta.
- Basilaiia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. *Pedagogical Research*, 5(4). <https://doi.org/10.29333/pr/7937>
- Budiman, J., Dokter, P., Nawawi, H. H., Laut, B., Tenggara, K. P., Pontianak, K., & Barat, K. (2021).
- Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 50(1), 45–50. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/LIK>
- Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. *Psychiatry Research*, 287. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cudai, A., & Guntur, N. M. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Donnelly, R., & Patrinos, H. A. (2022, October 1). Learning loss during Covid-19: An early systematic review. *Prospects*, Vol. 51, pp. 601–609. Springer Science and Business Media B.V. <https://doi.org/10.1007/s11125-021-09582-6>
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Fioravanti, G., Bocci Benucci, S., Prostamo, A., Banchi, V., & Casale, S. (2022). Effects of the COVID-19 pandemic on psychological health in a sample of Italian adults: A three-wave longitudinal study. *Psychiatry Research*, 315. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114705>
- Haber, N. A., Clarke-Deelder, E., Salomon, J. A., Feller, A., & Stuart, E. A. (2021). Impact Evaluation of Coronavirus Disease 2019 Policy: A Guide to Common Design Issues. *American Journal of Epidemiology*, 190(11). <https://doi.org/10.1093/aje/kwab185>.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Pertama; Mustrose, Ed.). Semarang: Widya Karya, Semarang.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (Edisi 6). PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., ... Abel, K. M. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. *The Lancet Psychiatry*, 7(10). [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30308-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4)

- Rivera Juarez, A. G., Prichard, J. R., & Berg, S. S. (2023). Psychological Well-Being in Asian and Asian American University Students: Impacts of Discrimination During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Adolescent Health*, 73(3), 510–518. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.04.016>
- Son, C., Hegde, S., Smith, A., Wang, X., & Sasangohar, F. (2020). Effects of COVID-19 on college students' mental health in the United States: Interview survey study. *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 22. <https://doi.org/10.2196/21279>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (S. Y. Ratri, Ed.). ALFABETA CV, Bandung.
- Viner, R., Russell, S., Saullé, R., Croker, H., Stansfield, C., Packer, J., ... Minozzi, S. (2022, April 1). School Closures during Social Lockdown and Mental Health, Health Behaviors, and Well-being among Children and Adolescents during the First COVID-19 Wave: A Systematic Review. *JAMA Pediatrics*, Vol. 176, pp. 400–409. American Medical Association. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.5840>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. C A P S.
- Yamashita, T., Kawamoto, D., & Nagatsu, H. (2021). A Study of Distance Learning under the State of Emergency Announced during the COVID-19 Pandemic: What Schools Need to Prepare under Emergency Co. In *Rigakuryoho Kagaku* (Vol. 3)

